

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA TERHADAP PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN ROTE
BARAT LAUT KABUPATEN ROTE NDAO**

Tioma Roniuli Hariandja

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Nusa Lontar Rote

Email : RHT1oma@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari Kantor Kecamatan Rote Barat Laut, data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan berupa teori-teori dan data pendukung, serta data tertier berupa dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pengumpulan data dilakukan melalui proses interview, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mengeluhkan bentuk pelayanan dari Aparatur Sipil Negara. Masyarakat menginginkan peningkatan pelayanan dari ASN yang membandel dan lamban dalam bekerja. Kondisi perkembangan politik daerah yang memanas juga menjadi penyebab semakin menurunnya pelayanan terhadap masyarakat karena bentuk pelayanan lebih diarahkan kepada kepentingan politik. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian khusus dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap ASN. Output dari pengawasan komisi ini tidak hanya dalam bentuk peningkatan pelayanan terhadap publik tetapi juga dapat menjadi contoh untuk instansi lain.

Kata Kunci : *Komisi Aparatur Sipil Negara, pelayanan pada masyarakat, pengawasan*

ABSTRACT

This study aims to know the implementation of supervision of the State Civil Apparatus (ASN) who do not carry out the task of service to the community. This research is an empirical study using primary data obtained directly from the North West Rote District Office, secondary data obtained from literature data in the form of theories and supporting data, and tertiary data in the form of applicable laws and regulations. Data collection method is done through an interview process, then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results showed that some people complained about the form of service from the State Civil Apparatus. The public wants to increase service from ASN which is stubborn and slow to work. The condition of regional political development that is heating up also causes the decline in services to the community because the form of service is more directed to political interests. This certainly needs special attention from the State Civil Apparatus Commission as an independent agency tasked with overseeing ASN. The output of the commission's oversight is not only in the form of improving services to the public but can also be an example for other agencies.

Keywords: *State Civil Apparatus Commission, service to the community, supervision*

PENDAHULUAN

Dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah birokrasi yang bertindak sebagai mesin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu pentingnya pengawasan terhadap birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*

Pengawasan masyarakat merupakan suatu jenis pengawasan yang dapat berfungsi sebagai wujud pengawasan melekat yang berasal dari luar proses manajemen atau proses kegiatan, antara lain aturan atau norma kemasyarakatan dan etika

Pelaksanaan pengawasan masyarakat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu :

1. Pengawasan langsung oleh warga masyarakat.
2. Pemberitahuan lewat media massa.
3. Pengawasan legal yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pemerintah selaku pembuat kebijakan yang mana diikuti oleh masyarakat luas di Indonesia maka diperlukan badan yang mengangkat pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Permasalahannya adalah bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao?

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan sebab data-data diperoleh dari kantor kecamatan dan wilayah kecamatan seperti desa, dusun, RT dan RW sehingga penelitian dilakukan di kantor kecamatan Rote Barat Laut kabupaten Rote Ndao.

Teknik pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada kantor kecamatan Rote Barat Laut kabupaten Rote Ndao.
- b. Interview yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada responden.
- c. Kuisisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengedarkan angket untuk di isi.

- d. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengutip pendapat para sarjana dari berbagai literatur yang relevan.

Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Datapenulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, yaitu model analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kantor Kecamatan Rote Barat Laut

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka telah terjadi perubahan paradigma sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, representatif dan akuntabel sehingga pemerintah kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao telah berupaya untuk meningkatkan pola pelayanannya kepada masyarakat, namun upaya tersebut masih mengalami berbagai kendala seperti minimnya sarana dan prasaran, sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan sehingga pekerjaan pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat. Keterlambatan dalam pelayanan memang sering menjadi kendala yang sulit untuk diatasi sebab segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kantor kecamatan Rote barat Laut semuanya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Keluhan dari masyarakat terhadap lambanya pelayanan dapat maklumi pemerintah kecamatan. Keluhan masyarakat diketahui dari berbagai pengaduan yang diterima langsung oleh camat Rote Barat Laut maupun melalui

Kotak saran yang disiapkan pada kantor Kecamatan Rote Barat Laut. Semua keluhan tersebut merupakan nilai positif yang perlu ditampung untuk menjadi perhatian dan sesegera mungkin ditindaklanjuti sehingga keluhan masyarakat itu tidak semakin menumpuk.

Bentuk pelayanan yang terjadi selama ini memang telah beralan namun masyarakat tetap menginginkan peningkatan pelayanan sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan urusan yang bertele-tele, banyak waktu terbuang sia-sia dan pekerjaan masyarakat terbengkalai.

Pengawasan terhadap pelayanan Aparatur Sipil Negara di kecamatan Rote Barat Laut sangat erat kaitannya dengan tugas pemerintahan sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Rote Barat Laut. Tugas umum aparatur pemerintahan dan tugas pembangunan dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Aparatur pemerintah kecamatan Rote Barat Laut dalam melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus melaksanakan tugas pembangunan. Oleh karena itu maka aparatur pemerintah kecamatan Rote Barat Laut perlu diawasi sehingga dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Kelemahan–kelemahan dalam pelaksanaan Pengawasan

Masyarakat Rote Ndao secara umum dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan sekilas dapat dikatakan bahwa dengan keterlibatan masyarakat Rote Ndao yang secara langsung merasakan penyelenggaraan pemerintahan mampu memberikan suatu sistem pengendalian (control system) yang lebih efektif tetapi meskipun demikian terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan. Kelemahan-kelemahan dalam pengawasan dapat uraikan sebagai berikut:

1. Sifat dari Pengawasan masyarakat yang sangat cair.

Masyarakat Rote Ndao termasuk dalam tipe masyarakat yang sangat ambisius untuk mencapai keinginan dan memiliki keinginan untuk cepat berkembang namun terkadang lemah sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu guna mencapai kepentingan pihak tertentu untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan. Sifat yang mudah mengikuti kepentingan orang lain inilah yang menjadi kelemahan dari pengawasan, sehingga dapat diibaratkan seperti air yang sementara mengalir dari sungai kelaut sehingga tidak dapat terjadi sebaliknya yakni dari laut ke sungai. Sebuah kasus klasik yang dapat

mencerminkan keberpihakan pengawasan terhadap kepentingan orang lain adalah pelaksanaan kebebasan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam bentuk demonstrasi sering ditumpangi kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang lebih besar dari tujuan demonstrasi yang sesungguhnya. Kasus kasus muatan kepentingan seperti sudah sering terjadi sehingga melemahkan sistem pengawasan.

2. Respons pemerintah yang sangat minim terhadap hasil pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Hasil pengawasan akan efektif apabila instansi atau pejabat yang berwenang memberikan respons yang positif dan bersedia menindaklanjuti hasil pengawasan yang diperoleh. Pengawasan yang dihasilkan. Dalam melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Rote Barat Laut Pemerintah memberikan keleluasaan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan dengan memberikan usul saran dan kritikan dalam bentuk tertulis dalam kotak saran namun usul saran kritikan masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan. Komisi Aparatur sipil negara sebagai lembaga yang dipercaya untuk melakukan tugas pengawasan ini seharusnya segera

melakukan tindakan terhadap setiap usul saran dan kritikan dari masyarakat.

3. Sikap antipasti dari masyarakat.

Partisipasi aktif semua komponen dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara memang sangat dibutuhkan demi kelancaran proses pelayanan administrasi yang baik demi tercapainya tujuan dari pembentukan pemerintahan pada semua tingkatan terutama titik kecamatan. Masyarakat Kecamatan rote barat Laut termasuk masyarakat yang sangat peka terhadap berjalannya roda pemerintahan dengan terus melayangkan berbagai kritikan dan saran namun yang sangat disesalkan adalah masyarakat tidak secara serius mengikuti perkembangan usul saran yang disampaikan sehingga usul saran dari masyarakat itu tidak terlaksana atau hilang.

4. Lemahnya perlindungan Hukum bagi pelaku pengawasan

Kerasnya dinamika politik di Kabupaten Rote Ndao sangat berpengaruh pada hampir semua tingkatan baik perencanaan pembangunan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Hal ini disebabkan oleh adanya kekuatiran dari masyarakat akan adanya tekanan dari pemerintah bila masyarakat diketahui telah melakukan suatu pengawasan dan membuat laporan terhadap hasil

pengawasannya. Perlindungan hukum masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa dapat dengan leluasa melakukan pengawasan secara lebih independen tanpa ada rasa khawatir terhadap ancaman dari pemerintah daerah. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat ini perlu ditindaklanjuti oleh wakil Rakyat kabupaten Rote Ndao dengan membuat regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menyampaikan hasil pengawasannya pada instansi terkait.

Rekomendasi hasil pengasawasan

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menuntut adanya praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Pemerintah kabupaten Rote Ndao memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi mengingat proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih responsive, representative dan akuntabel.

Karakter masyarakat pada dasarnya dapat dilihat melalui organisasi-organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, modal sosial (norma, tradisi, jaringan sosial), gaya kepemimpinan dan mekanisme pengelolaan konflik. Keempat elemen dalam masyarakat inilah yang

banyak mempengaruhi partisipasi masyarakat baik dalam ranah ekonomi sosial, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Artinya keempat elemen tersebut memberikan sumbangan atas naik turunnya derajat intensitas partisipasi masyarakat.

Dengan diberikannya akses pengawasan, telah memberikan hak bagi masyarakat untuk melakukan tindakan lain seperti melakukan penyampaian pendapat baik melalui kotak kritik dan saran, media berita dan lainnya. Peran serta masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi tentang penyimpangan atau hambatan yang diambati atau dialami dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Dari banyaknya pikiran atau pendapat dari masyarakat dalam melakukan tindakan pengawasan ada beberapa hal yang biasanya disampaikan masyarakat antara lain:

1. Subangan pikiran tentang pelaksanaan tugas tertentu dengan maksud meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Saran dan gagasan dalam rangka membantu aparatur pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi
3. Keluhan terhadap pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat yang dirasa kurang memuaskan

4. Pengaduan soal pelaksanaan tugas aparat yang dinilai menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyimpangan sendiri adalah tiap perbuatan yang menimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku, termasuk kebijaksanaan pimpinan dan petunjuk pelaksana
5. Laporan Perilaku oknum pejabat dan petugas yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

KEIMPULAN

1. Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga Independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara. Lembaga ini diharapkan benar-benar dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang baik di Kecamatan Rote Barat Laut;
2. Komis Aparatur Sipil Negara dapat memberikan nilai tambah terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kecamatan Rote barat Laut sehingga outputnya tidak hanya dalam bentuk peningkatan pelayanan terhadap publik atau pun kepuasan masyarakat secara umum namun juga dapat menjadi contoh

bagi instansi pemerintah lainnya di kabupaten Rote Ndao bahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Rote Barat Laut dapat memberikan jaminan keyakinan terhadap publik melalui sebuah pemeriksaan bahwa hasil pemeriksaannya di Kantor Kecamatan Rote Barat Laut akan diekspos secara umum untuk publik, bahwa sebuah instansi yang di dalamnya terdapat fungsi pengawasan yang dimaksud telah terhindar dari segala macam penyimpangan-penyimpangan di dalamnya serta dengan kata lain telah berjalan ataupun patuh sesuai aturan yang berlaku sebab selama ini hasil pemeriksaan dari lembaga-lembaga pengawasan sebelumnya tidak mempublikasikan hasil pemeriksaannya sehingga ini menjadi kelemahan yang dimiliki oleh lembaga pengawas.
4. Rekomendasi dari Lembaga Pengawas baik Intern maupun ekstern yang pernah melakukan pengawasan di kantor Kecamatan Rote Barat Laut agar Aparatur Sipil Negara Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Meningkatkan kinerja dalam

kegiatan operasional belum terlaksanakan secara maksimal

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rote barat Laut Kabupaten Rote Ndao perlu untuk meningkatkan kinerjanya sehingga tidak mengecewakan masyarakat pada saat melaksanakan tugas pelayanan sebagai ASN
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap ASN di kecamatan Rote Barat Laut harus sering dilakukan guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara
3. Bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan karya ilmiah ini dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber untuk melakukan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1978. Public Policy Making. Second Edition. New York : Holt, Rinehart and Winston.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. Beberapa Catatan Tentang Lembaga-lembaga Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Bahan diskusi Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non-Struktural oleh Kantor Menpan Republik Indonesia, 1 Maret 2011.
- Daft, Richard L., 1992. Organization Theory and Design. Fourth Edition. Singapore : Info Access Distribution Pte Ltd.
- Dwiyanto, Agus . 2015. Reformasi Birokrasi Kontekstual. Kembali Ke Jalur yang Benar. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gerston, Larry N. 2010. Public Policy Making. Process and Principles. Third Edition. Armonk New York : M.E. Sharpe.
- Jones, Charles O. 1984. An Introduction to The Study of Public Policy. Third Edition. California : Brooks/Cole Publishing Company
- LAN. Arsitektur LNS, Definisi, Kriteria, dan Arahan Penataan Ke Depan. [http://inovasi.lan.go.id/uploads/download/1452182781_Arsitektur-LNS-\(PIKSA-LAN\).pdf](http://inovasi.lan.go.id/uploads/download/1452182781_Arsitektur-LNS-(PIKSA-LAN).pdf) diunduh pada tanggal 27 Juli 2017.
- Harrison, Frank . 1986. Policy, Strategy and Managerial Action. Boston : Houghton Mifflin Company
- Marzuki, Peter Mahmud . 2015. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta : Prenandamedia Gorup.
- Purwadarminta, W.J.S. 2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

- Pfeffer, Jeffrey. 1992. *Managing with Power. Politics and Influence in Organizations.* Boston : Harvard Business School Press.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1997. *Metode Penelitian Komunikasi.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Razik, T.A. dan Swanson A.D. 1995. *Fundamental Concepts of Educational Leadership and Management.* Englewood Cliffs : Prentice Hall.
- Ridwan, H.R. 2014. *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi.* Jakarta: Rajawali Pres.
- Robbins, Stephen P. 1990. *Organization Theory : Structure, Designs and Applications.* Third Edition. London : Prentice-Hall International, Inc.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi. Edisi Revisi.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Stoner, James A.F dan R. Edward Freeman. 1989. *Management.* Fourth Edition. Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice Hall International Editions.
- Wibawa, Samodra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
- TAP MPR No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
- UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.